



LAPORAN BARANG PENGGUNA

TAHUNAN AUDITED
TAHUN ANGGARAN 2024

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN
BEBAS BATAM



<https://www.bpmatam.go.id>



Jl. Ibnu Sutow No. 1 Batam
Centre, Kepulauan Riau

KOTA BATAM, INDONESIA

KOTAK POS 151;

TELEPON 0778 -462048

FAX; 0778-462240



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

JALAN IBNU SUTOWO NO. 1. BATAM CENTRE, PULAU BATAM 29411
KOTAK POS 151 ; TELEPON (0778) 462047, 462048
FAKSIMILE (0778) 462240, 462456 ; SITUS www.bpmatam.go.id

Nomor : B- 95 /A1/AP.03/5/2025 6 Mei 2025
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Penyampaian Laporan Barang Pengguna Tahunan *Audited* Tahun 2024

Yth. Direktur Jenderal Kekayaan Negara
Kementerian Keuangan RI
Gedung Syafruddin Prawiranegara II
Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10710

Menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan nomor: S-135/KN/KN.2/2024 Tanggal 30 Desember 2024 hal Penyusunan dan Penyampaian Laporan Barang Pengguna Tahunan *Audited* Tahun 2024, bersama ini terlampir disampaikan Laporan Barang Pengguna Tahunan *Audited* Tahun 2024 Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, diucapkan terimakasih.



Anggota/Deputi Bidang
Administrasi dan Keuangan

Alexander Zulkarnain
NIP. 196509131986031002

Tembusan:

1. Kepala BP Batam
2. Direktur PKKN DJKN
3. Kepala Satuan Pemeriksa Internal BP Batam



Kata Pengantar

Laporan Barang Pengguna
Tahunan Audited Tahun 2024



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa , Badan Pengusahaan Batam sebagai pelaksana penatausahaan BMN di tingkat Pusat selaku Pengguna Barang, menyajikan Laporan Barang Pengguna Tahunan *Audited* (LBP) Tahun Anggaran 2024 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2008 dan terakhir perubahannya dengan PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah.

Laporan Barang Pengguna Tahunan *Audited* Tahun Anggaran 2024 memberikan gambaran posisi BMN pada tanggal 31 Desember 2024 dan mutasi yang terjadi selama Tahun Anggaran 2024 yang disajikan berdasarkan Perkiraan Neraca, Penyusutan Barang Pengguna Tahunan per 31 Desember 2024 dan Catatan atas Laporan Barang Pengguna Tahunan *Audited* sebagai berikut:

1. Laporan Barang Pengguna Tahunan *Audited* Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Perkiraan Neraca menyajikan informasi tentang aset dalam bentuk Barang Milik Negara terdiri atas: Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan dan Jembatan, Irigasi, Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan dan Aset Lainnya serta Akumulasi Penyusutan Aset Tetap posisi per 31 Desember 2024
2. Saldo Persediaan pada Laporan Barang Pengguna Tahunan *Audited* Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp125.662.495.658**
3. Nilai BMN Intrakomptabel posisi 31 Desember 2024 adalah sebesar **Rp66.377.334.326.249** dan Ekstrakomptabel sebesar **Rp13.158.487.709** sehingga total nilai BMN gabungan adalah **Rp66.390.492.813.958**
4. Catatan atas Laporan Barang Pengguna Tahunan *Audited* Tahun Anggaran 2024 menyajikan informasi tentang hal-hal yang belum termuat dalam LBP , yang meliputi: uraian tentang kebijakan akuntansi dan penjelasan pos-pos laporan BMN, pendekatan penyusunan laporan, daftar rinci atau uraian atas nilai yang disajikan dalam laporan BMN serta Informasi BMN lainnya



5. Akumulasi penyusutan BMN Intrakomptabel posisi 31 Desember 2024 adalah sebesar **Rp9.784.744.829.445** dan akumulasi penyusutan BMN Ekstrakomptabel adalah sebesar **Rp3.491.981.049** Maka akumulasi penyusutan BMN gabungan adalah sebesar **Rp9.788.236.810.494**

Laporan Barang Pengguna Tahunan *Audited* Tahun Anggaran 2024 ini disusun berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tanggal 27 September 2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010. Selanjutnya Laporan Barang Pengguna Tahunan *Audited* Tahun Anggaran 2024 ini dimaksudkan sebagai bahan penyusunan Laporan Barang Milik Negara Pusat Tahun Anggaran 2024.

Kami harapkan Laporan Barang Pengguna Tahunan *Audited* Tahun Anggaran 2024 ini dapat memberikan gambaran dan informasi kepada *stakeholders* terkait penggunaan BMN yang sesuai dengan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006.

Kami menyadari bahwa Laporan Barang Pengguna Tahunan *Audited* Tahun Anggaran 2024 ini masih belum sempurna. Untuk itu kami harapkan tanggapan, saran maupun kritik yang membangun dari para pengguna laporan ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan Laporan Barang Pengguna Tahunan *Audited* Tahun Anggaran 2024 secara tepat waktu dan akurat sehingga terwujud penggunaan BMN yang tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penanggung Jawab
Laporan Barang Pengguna
Kepala Biro Keuangan

Siswanto
NIP. 197606011998111001



Executive Summary

**Laporan Barang Pengguna
Tahunan *Audited* Tahun 2024**



EXECUTIVE SUMMARY

Kepala Biro Keuangan BP Batam selaku Penanggung Jawab Laporan Barang Pengguna Tahunan berkewajiban untuk menyusun Laporan Barang Pengguna – berupa Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBP) yang meliputi: Perkiraan Neraca dan Catatan atas Laporan Barang Pengguna Tahunan *Audited*, sebagaimana diatur dalam pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014.

Laporan Barang Pengguna Tahunan *Audited* Tahun Anggaran 2024 telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010.

Laporan Barang Pengguna Tahunan *Audited* Tahun Anggaran 2024 ini disusun berdasarkan data Barang Milik Negara (BMN) pada Satuan Kerja BP Batam selaku Pengguna Barang Tingkat Satker yang dituangkan dalam Laporan Barang Pengguna Tahunan *Audited* Tahun Anggaran 2024.

1. NERACA

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah pusat mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024, dalam hal ini neraca yang disajikan merupakan neraca BMN yang terdiri dari Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Aset Lainnya serta Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.

Nilai BMN posisi per 31 Desember 2024 di Neraca adalah sebesar **Rp66.377.334.326.249** terdiri dari Persediaan sebesar **Rp125.662.495.658** Aset Tetap sebesar **Rp58.828.758.603.884**, Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar **Rp931.479.828.189**, Aset Konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah sebesar **Rp4.370.300.580.515**, Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra sebesar **Rp338.613.637.932**, Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra Dalam Pengerjaan sebesar **Rp922.670.502.369** Aset Lainnya sebesar **Rp859.848.677.702**, dan Akumulasi Penyusutan sebesar **Rp9.784.744.829.445**.



Ringkasan Neraca atas BMN

No	Uraian Neraca	31 Desember 2023	31 Desember 2024
		<i>Audited</i> (Rp)	<i>Audited</i> (Rp)
1	Aset Lancar	17.535.147.209	125.662.495.658
2	Aset Tetap	61.515.041.047.526	58.828.758.603.884
3	Konstruksi Dalam Pengerjaan	774.262.372.532	931.479.828.189
4	Aset Konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah		4.370.300.580.515
5	Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra		338.613.637.932
6	Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra Dalam Pengerjaan		922.670.502.369
7	Aset Lainnya	699.327.205.946	859.848.677.702
	Nilai BMN	63.006.165.773.213	66.377.334.326.249
7	Akumulasi Penyusutan	(9.009.767.301.704)	(9.784.744.829.445)
	Nilai Netto	53.996.398.471.509	56.592.589.496.804

2. LAPORAN BARANG PENGGUNA TAHUNAN *AUDITED*

Laporan Barang Pengguna Tahunan *Audited* adalah laporan yang menggambarkan posisi Barang Pengguna Tahunan pada tanggal 31 Desember 2024, Laporan Barang Pengguna Tahunan *Audited* ini disajikan berdasarkan kelompok barang yang terdiri dari intrakomptabel dan ekstrakomptabel

Nilai BMN Intrakomptabel merupakan Nilai BMN sebagaimana yang tercantum dalam neraca BMN posisi 31 Desember 2024 yaitu sebesar **Rp66.377.334.326.249** sementara nilai laporan BMN Ekstrakomptabel merupakan nilai BMN yang perolehannya dibawah nilai kapitalisasi BMN, nilai BMN Ekstrakomptabel adalah sebesar **Rp13.158.487.709**

3. CATATAN ATAS LAPORAN BARANG PENGGUNA TAHUNAN *AUDITED*

Catatan atas Laporan Barang Pengguna Tahunan *Audited* atau lebih dikenal dengan Catatan Ringkas Barang (CRB) menguraikan secara ringkas atas nilai BMN per perkiraan neraca, termasuk kebijakan akuntansi yang digunakan untuk masing-masing perkiraan.

Catatan Ringkas Barang (CRB) mengungkapkan pula kejadian penting yang terjadi setelah tanggal pelaporan serta informasi tambahan yang diperlukan.



CALBMN

**Laporan Barang Pengguna
Tahunan Audited Tahun 2024**



CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA PADA LAPORAN BARANG PENGGUNA TAHUNAN *AUDITED* TAHUN ANGGARAN 2024

I. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum:

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- g. Peraturan Menteri Keuangan 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindah tanganan Barang Milik Negara;
- i. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat j.o. PMK Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat
- k. Peraturan Menteri Keuangan 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;



2. Entitas Pelaporan:

- a. Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB), Unit Akuntansi Pengguna Barang-Eselon 1 (UAPB-E1), Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPBW) dan Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAKPB) berada di Biro Keuangan BP Kawasan PB dan PB Batam
- b. Unit Penatausahaan Pengguna Barang (UPKPB) menurut Surat Keputusan Ketua Otorita Batam Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Nomor 07/KPTS/KA/I/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Negara Dilingkungan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam adalah unit penatausahaan BMN pada tingkat Pengguna Barang dilingkungan Otorita Batam dan penanggungjawab UPKPB adalah Direktur/Kepala Kantor/Kepala Biro yang secara fungsional dilakukan oleh Unit Eselon III dan/atau eselon IV sedangkan Unit Penatausahaan Pengguna Barang-Eselon I (UPPB-E1) ditetapkan hanya 1 (satu) yakni Deputy Administrasi dan Perencanaan yang secara fungsional dilakukan oleh Biro Keuangan, terdiri dari 10 satker:

- 1) UPKPB Biro Umum
- 2) UPKPB Rumah Sakit
- 3) UPKPB Kantor Bandar Udara
- 4) UPKPB Direktorat Pengamanan
- 5) UPKPB Kantor Pengelolaan Air dan Air Limbah
- 6) UPKPB Kantor Pelabuhan Laut
- 7) UPKPB Direktorat Pembangunan
- 8) UPKPB Direktorat Pengelolaan Lahan
- 9) UPKPB Kantor Perwakilan Jakarta
- 10) UPKPB Stasiun Meteorologi

Pada tahun 2012 dengan terbitnya Bagian Anggaran 112 untuk BP Batam terjadi perubahan, BP Batam secara nomenklatur menjadi 1 (satu) satker dan 9 (sembilan) Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang (UAPKPB) tanpa unit pembantu UAPKPB Stasiun Meteorologi karena sudah berdiri sendiri dan tidak lagi di bawah BP Batam, unit-unit pembantu tersebut terdiri dari:



- 1) UAPKPB Biro Umum dan Sekretariat
- 2) UAPKPB RSBP Batam
- 3) UAPKPB Kantor Bandara Hang Nadim
- 4) UAPKPB Direktorat Pengamanan
- 5) UAPKPB Kantor Pengelolaan Air dan Limbah
- 6) UAPKPB Kantor Pelabuhan Laut Batam
- 7) UAPKPB Direktorat Pembangunan Prasarana dan Saran
- 8) UAPKPB Kantor Pengelolaan Lahan
- 9) UAPKPB Kantor Perwakilan Jakarta

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 122 Tahun 2019 tanggal 24 Juli 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala BP Batam Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pelaksana Penatausahaan Barang Milik Negara BP Batam Tahun Anggaran 2019, Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPKPB) adalah unit penatausahaan BMN pada tingkat Pengguna Barang dilingkungan BP Batam dan penanggungjawab UAPKPB adalah Direktur/Kepala Kantor/Kepala Biro yang secara fungsional dilakukan oleh Unit Eselon III dan/atau eselon IV sedangkan Unit Penatausahaan Pengguna Barang-Eselon I (UPPB-E1) / UAPB Tingkat Kementerian/ Lembaga ditetapkan hanya 1 (satu) yakni Deputi Bidang Administrasi dan Umum yang secara fungsional dilakukan oleh Biro Keuangan dan dibantu oleh 10 sub satker/ UAPKPB :

- 1) UAPKPB Tingkat Unit Kerja Biro Umum dan Sekretariat
- 2) UAPKPB Tingkat Unit Kerja Kantor Perwakilan Jakarta
- 3) UAPKPB Tingkat Unit Kerja Unit Usaha Pengelolaan Logistik Aerocity Hang Nadim
- 4) UAPKPB Tingkat Unit Kerja Badan Usaha Pengelola Pelabuhan Batam
- 5) UAPKPB Tingkat Unit Kerja Rumah Sakit BP Batam
- 6) UAPKPB Tingkat Unit Kerja Kantor Pengelolaan Lahan
- 7) UAPKPB Tingkat Unit Kerja Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana
- 8) UAPKPB Tingkat Unit Kerja Direktorat Pemanfaatan Aset



- 9) UAPKPB Tingkat Unit Kerja Kantor Pengelolaan Air dan Limbah
- 10) UAPKPB Tingkat Unit Kerja Direktorat Pengamanan

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 97 Tahun 2020 tanggal 13 Mei 2020 tentang Pelaksana Penatausahaan Barang Milik Negara BP Batam Tahun Anggaran 2020, Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPKPB) adalah unit penatausahaan BMN pada tingkat Pengguna Barang dilingkungan BP Batam dan penanggungjawab UAPKPB adalah Direktur/Kepala Kantor/Kepala Biro yang secara fungsional dilakukan oleh Unit Eselon III dan/atau eselon IV sedangkan Unit Penatausahaan Pengguna Barang-Eselon I (UPPB-E1) / UAPB Tingkat Kementerian/ Lembaga ditetapkan hanya 1 (satu) yakni Deputi Bidang Administrasi dan Umum yang secara fungsional dilakukan oleh Biro Keuangan dan dibantu oleh 9 sub satker/ UAPKPB:

- 1) UAPKPB Tingkat Unit Kerja Biro Umum
- 2) UAPKPB Tingkat Unit Kerja Kantor Perwakilan Jakarta
- 3) UAPKPB Tingkat Unit Kerja Badan Usaha Bandara
- 4) UAPKPB Tingkat Unit Kerja Badan Usaha Pelabuhan
- 5) UAPKPB Tingkat Unit Kerja Badan Usaha Rumah Sakit
- 6) UAPKPB Tingkat Unit Kerja Direktorat Pengelolaan Lahan
- 7) UAPKPB Tingkat Unit Kerja Direktorat Infrastruktur Kawasan
- 8) UAPKPB Tingkat Unit Kerja Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan
- 9) UAPKPB Tingkat Unit Kerja Direktorat Pengamanan Aset

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 90 Tahun 2020 tanggal 24 April 2020 tentang Pelaksana Penatausahaan Persediaan BP Batam Tahun Anggaran 2020 yang terdiri dari 21 Petugas Persediaan pada masing-masing Eselon II dilingkungan BP Batam, dengan Susunan sebagai berikut:

- 1) Petugas Biro Keuangan
- 2) Petugas Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi



- 3) Petugas Biro Umum
- 4) Petugas Dir Evaluasi dan Pengendalian
- 5) Petugas Biro Hubungan Masyarakat, Promosi dan Protokol
- 6) Petugas Dir Peningkatan Kinerja dan Manajemen Risiko
- 7) Petugas Dir Pengelolaan Lahan
- 8) Petugas Pusat Harmonisasi Kebijakan
- 9) Petugas Direktorat Restrukturisasi
- 10) Petugas Badan Usaha Rumah Sakit BP Batam
- 11) Petugas Pusat Perencanaan Program Strategis
- 12) Petugas Satuan Pemeriksa Internal
- 13) Petugas Biro Hukum
- 14) Petugas Pusat Pengembangan KPBPBB dan KEK
- 15) Petugas Dir Infrastruktur Kawasan
- 16) Petugas Dir Pengamanan Aset
- 17) Petugas Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan
- 18) Petugas Badan Usaha Bandara
- 19) Petugas Badan Usaha Pelabuhan
- 20) Petugas Kantor Perwakilan Jakarta
- 21) Petugas Dir Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 178 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Negara Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Tahun Anggaran 2024, menetapkan bahwa Pelaksanaan BMN terdiri dari:

- a) Unit Akuntansi Pengguna Barang Tingkat Kementerian/Lembaga (UAPB) terdiri dari:
 1. Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB);
 2. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Struktural I (UAPB-S1); dan
- b) Unit Akuntansi Pembantu Kuasa Pengguna Barang Tingkat Satuan Kerja (UAPKPB) yang terdiri dari 11 (sebelas) Unit Akuntansi



Pembantu Pengguna Barang Tingkat Satuan kerja (UAPKPB) terdiri dari;

1. UAPKPB Tingkat Satuan Kerja Biro Umum
2. UAPKPB Tingkat Satuan Kerja Kantor Perwakilan Jakarta
3. UAPKPB Tingkat Satuan Kerja Unit Usaha Pengelolaan Logistik Aerocity
4. UAPKPB Tingkat Satuan Kerja Badan Usaha Pelabuhan
5. UAPKPB Tingkat Satuan Kerja Badan Usaha Rumah Sakit
6. UAPKPB Tingkat Satuan Kerja Direktorat Pengelolaan Pertanahan
7. UAPKPB Tingkat Satuan kerja Direktorat Infrastruktur Kawasan
8. UAPKPB Tingkat Satuan Kerja Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan
9. UAPKPB Tingkat Satuan Kerja Direktorat Pengamanan Aset
10. UAPKPB Tingkat Satuan Kerja Pusat Data dan Sistem Informasi
11. UAPKPB Tingkat Satuan Kerja Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 44 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Penatausahaan Persediaan BP Batam, bahwa susunan pelaksana penatausahaan persediaan terdiri dari;

- 1) Petugas Biro Keuangan
- 2) Petugas Biro Sumber Daya Manusia
- 3) Petugas Biro Umum
- 4) Petugas Dir Evaluasi dan Pengendalian
- 5) Petugas Biro Hubungan Masyarakat, Promosi dan Protokol
- 6) Petugas Dir Peningkatan Kinerja dan Manajemen Risiko
- 7) Petugas Dir Pengelolaan Lahan
- 8) Petugas Pusat Harmonisasi Kebijakan
- 9) Petugas Direktorat Restrukturisasi
- 10) Petugas Badan Usaha Rumah Sakit BP Batam
- 11) Petugas Pusat Perencanaan Program Strategis
- 12) Petugas Satuan Pemeriksa Internal
- 13) Petugas Biro Hukum
- 14) Petugas Pusat Pengembangan KPBPBB dan KEK



- 15) Petugas Dir Infrastruktur Kawasan
- 16) Petugas Dir Pengamanan Aset
- 17) Petugas Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan
- 18) Petugas Unit Usaha Pengelolaan Logistik Aerocity
- 19) Petugas Badan Usaha Pelabuhan
- 20) Petugas Kantor Perwakilan Jakarta
- 21) Petugas Dir Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal
- 22) Petugas Direktorat Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 23) Petugas Pusat Data Dan Sistem Informasi
- 24) Petugas Sistem Pengelolaan Air Minum

3. Periode Laporan: Semesteran dan Tahunan



II. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

- Ketentuan-ketentuan yang terkait Penyusutan Barang Milik Negara adalah sebagai berikut:
 - a. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 Tanggal 24 Februari 2012 Tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 4/KMK.06/2013 Tanggal 02 Januari 2013 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 Tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
 - b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 Tanggal 02 Januari 2013 Tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
 - c. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.6/2013 Tanggal 13 Maret 2013 Tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
 - d. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KM.6/2013 Tanggal 12 April 2013 Tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
 - e. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014 Tanggal 16 Mei 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 Tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
 - f. Penyusutan aset tetap adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tak Berwujud



- d. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu
 - Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat
 - Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan dinilai menggunakan metode harga pembelian terakhir karena setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis. Persediaan di setiap unit di BP Batam di input ke dalam Aplikasi Akuntansi Persediaan oleh setiap petugas/operator persediaan unit (UAPKPB Persediaan) yang kemudian direkonsiliasi oleh petugas persediaan (UAKPB Persediaan) yang berada di Biro Keuangan.

III. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan Barang Pengguna Tahunan *Audited* Tahun Anggaran 2024 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Nilai BMN gabungan (Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel) yang disajikan pada Laporan Barang Pengguna Tahunan *Audited* Tahun Anggaran 2024 ini adalah sebesar **Rp66.390.492.813.958** yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebesar **Rp63.019.387.738.113** dan nilai mutasi yang terjadi selama Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp3.371.105.075.845** nilai mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi non-keuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/ atau penambahan BMN yang berasal dari pembiayaan APBN dan PNBP selama periode tahun berjalan, sedangkan transaksi non-keuangan



merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN dan PNBPN periode tahun berjalan.

Laporan Barang Pengguna Tahunan *Audited* Tahun Anggaran 2024 merupakan himpunan dari LBP pada 1 (Satu) Pengguna Barang yang terdiri atas 11 (Tiga Belas) UAPKPB (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang)

Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas:

1. Neraca;
2. Laporan Barang Persediaan;
3. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel dan Gabungan);
4. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
5. Laporan Aset Tak Berwujud;
6. Laporan Barang Bersejarah;
7. Laporan Kondisi Barang; (*untuk*)
8. Laporan Penyusutan;
9. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara;
10. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) internal SAK-SIMAK pada BP Kawasan Batam
11. Laporan PNBPN yang terkait dengan pengelolaan BMN; dan
12. Arsip Data Komputer (ADK).



NKF Tripartit LK TA 2024

**Laporan Barang Pengguna
Tahunan Audited Tahun 2024**

NOTA KESEPAKATAN ANGKA ASERSI FINAL

LAPORAN KEUANGAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BPKPB BATAM) (BA112) TAHUN 2024

Nomor: NKF-50/112/PB.6/2025

Pada hari **Kamis, 08 Mei 2025**, telah dilaksanakan **Rekonsiliasi Tiga Pihak** yang menyepakati angka-angka sebagaimana Lampiran Nota Kesepakatan ini. **BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BPKPB BATAM) (BA 112)** akan menyusun dan menyampaikan asersi final Laporan Keuangan Tahun 2024 secara lengkap kepada Ditjen Perbendaharaan dan menyampaikan Laporan BMN kepada Ditjen Kekayaan Negara **paling lambat tanggal 08 Mei 2025.**

PARA PIHAK YANG MENYEPAKATI

No	Nama	Unit Instansi
1	Hesty Susiana, Kepala Bagian Akuntansi dan Laporan Keuangan	KEMENTERIAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BPKPB BATAM) – selaku Penyusun LKKL
2	Idris Aswin , Kepala Subdirektorat Perumusan Kebijakan Barang Milik Negara III	DJKN – selaku Penyusun LBMN
3	Rahmat Mulyono, Plt. Kepala Subdirektorat Bimbingan Akuntansi Instansi dan Bendahara Umum Negara	DJPb – selaku Penyusun LKPP
4	Robby Mulyadi, Ketua Tim	BPK RI - selaku Auditor BPK K/L





LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

Uraian	Unaudited	Koreksi BPK dan/atau Koreksi Mandiri	Audited
Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0
Pendapatan Perpajakan	0	0	0
Pajak Dalam Negeri	0	0	0
Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	2,296,197,142,731	0	2,296,197,142,731
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0
Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0
Pendapatan BLU	2,295,435,197,773	0	2,295,435,197,773
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	761,944,958	0	761,944,958
Pendapatan Hibah	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	2,296,197,142,731	0	2,296,197,142,731
Belanja Negara	0	0	0
Belanja Pemerintah Pusat	2,647,409,074,448	0	2,647,409,074,448
Belanja Pegawai	0	0	0
Belanja Barang	1,233,530,687,456	0	1,233,530,687,456
Belanja Modal	1,413,878,386,992	0	1,413,878,386,992
Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0
Belanja Subsidi	0	0	0
Belanja Hibah	0	0	0
Belanja Bantuan Sosial	0	0	0
Belanja Lain-lain	0	0	0
Transfer ke Daerah dan Dana Desa	0	0	0
Transfer ke Daerah	0	0	0
Dana Perimbangan	0	0	0
Dana Transfer Umum	0	0	0
Dana Bagi Hasil	0	0	0
Dana Alokasi Umum	0	0	0
Dana Transfer Khusus	0	0	0
Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0
Dana Insentif Daerah	0	0	0
Dana Keistimewaan DIY	0	0	0
Dana Otonomi Khusus	0	0	0
Dana Desa	0	0	0
Hibah Kepada Daerah	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	2,647,409,074,448	0	2,647,409,074,448
PEMBIAYAAN	0	0	0



KERTAS KERJA NERACA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

Uraian	Unaudited	Koreksi BPK dan/atau Koreksi Mandiri	Audited
ASET	0	0	0
ASET LANCAR	0	0	0
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
Kas di Bendahara Penerimaan	0	0	0
Kas Lainnya dan Setara kas	267,189,181,760	-267,189,181,760	0
Kas pada BLU	857,249,709,020	-857,249,709,020	0
Investasi Jangka Pendek BLU	0	0	0
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	0	0	0
Uang Muka Belanja (prepayment)	0	0	0
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	5,660,525,975	-5,660,525,975	0
Piutang Perpajakan	0	0	0
Penyisihan PTH-Piutang Perpajakan	0	0	0
Piutang Bukan Pajak	1,613,847,100	-1,613,847,100	0
Penyisihan PTH - Piutang Bukan Pajak	0	0	0
Bagian Lancar TPA	0	0	0
Penyisihan PTH-Bagian Lancar TPA	0	0	0
Bagian Lancar TP/TGR	0	0	0
Penyisihan PTH-Bagian Lancar TP/TGR	0	0	0
Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya	0	0	0
Penyisihan PTH-Bagian Lancar PJPL	0	0	0
Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya (Netto)	0	0	0
Piutang dari Kegiatan BLU	485,998,339,551	-485,998,339,551	0
Penyisihan PTH - Piutang dari Kegiatan BLU	-170,086,752,873	170,086,752,873	0
Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum	0	0	0
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	0	0	0
Persediaan	126,229,770,443	-126,229,770,443	0
Persediaan yang Belum Diregister	0	0	0
Jumlah Aset Lancar	1,573,854,620,976	-1,573,854,620,976	0
ASET TETAP	0	0	0
Tanah	41,195,297,421,484	-41,195,297,421,484	0
Peralatan dan Mesin	1,620,179,128,886	-1,620,179,128,886	0
Gedung dan Bangunan	3,665,400,834,829	-3,665,400,834,829	0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	12,317,084,075,738	-12,317,084,075,738	0
Aset Tetap Lainnya	10,860,155,632	-10,860,155,632	0
Konstruksi Dalam Pengerjaan	951,951,940,312	-951,951,940,312	0
Akumulasi Penyusutan	-7,427,712,943,005	7,427,712,943,005	0
Aset Konsesi Jasa	4,703,399,782,286	-4,703,399,782,286	0
Aset Tetap yang Belum Diregister	0	0	0
Jumlah Aset Tetap	54,901,794,791,676	-54,901,794,791,676	0
PROPERTI INVESTASI	0	0	0
Properti Investasi	153,640,611,560	-153,640,611,560	0
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	0	0	0
Jumlah Properti Investasi	153,640,611,560	-153,640,611,560	0
PIUTANG JANGKA PANJANG	0	0	0
Tagihan Penjualan Angsuran	0	0	0
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - TPA	0	0	0
Tagihan TP/Tuntutan Ganti Rugi	0	0	0
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - TP/TGR	0	0	0
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi BLU	0	0	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi BLU	0	0	0
Piutang Jangka Panjang Lainnya (PJPL)	0	0	0
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - PJPL	0	0	0
Jumlah Piutang Jangka Panjang	0	0	0
ASET LAINNYA	0	0	0
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	402,192,570,867	-402,192,570,867	0
Aset Tak Berwujud	114,156,034,303	-114,156,034,303	0
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	0	0	0



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENGUSAHA KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Dana yg Dibatasi Penggunaannya	30,121,811,037	-30,121,811,037	0
Dana Penjaminan	0	0	0
Dana Kelolaan BLU	0	0	0
Aset Lain-lain	207,738,856,610	-207,738,856,610	0
Aset Lain-lain-Badan Layanan Umum	0	0	0
Akum. Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	-235,531,077,237	235,531,077,237	0
Jumlah Aset Lainnya	518,678,195,580	-518,678,195,580	0
JUMLAH ASET	57,147,968,219,792	-57,147,968,219,792	0
KEWAJIBAN	0	0	0
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0	0	0
Utang kepada Pihak Ketiga	304,015,059,805	-304,015,059,805	0
Utang Kepada Pihak Ketiga II	0	0	0
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0	0	0
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	0	0	0
Pendapatan Diterima Dimuka	3,629,977,340,684	-3,629,977,340,684	0
Hibah Yang Belum Disahkan	0	0	0
Uang Muka dari KPPN	0	0	0
Utang Jangka Pendek Lainnya	0	0	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	3,933,992,400,489	-3,933,992,400,489	0
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0	0	0
Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN	0	0	0
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya	0	0	0
Kewajiban Konsesi Jasa	333,099,201,771	-333,099,201,771	0
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	333,099,201,771	-333,099,201,771	0
JUMLAH KEWAJIBAN	4,267,091,602,260	-4,267,091,602,260	0
EKUITAS	52,880,876,617,532	-52,880,876,617,532	0
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	57,147,968,219,792	-57,147,968,219,792	0



LAPORAN OPERASIONAL (LO)

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

Uraian	Unaudited	Koreksi BPK dan/atau Koreksi Mandiri	Audited
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0
Pendapatan Cukai	0	0	0
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	0	0
Pendapatan Badan Layanan Umum	2,190,852,071,665	-519,922,219,846	1,670,929,851,819
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	2,190,852,071,665	-519,922,219,846	1,670,929,851,819
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0
Pendapatan Hibah	0	0	0
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	2,190,852,071,665	-519,922,219,846	1,670,929,851,819
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0
Beban Pegawai	479,454,292,144	0	479,454,292,144
Beban Persediaan	62,808,926,393	618,711,997	63,427,638,390
Beban Barang dan Jasa	426,547,908,991	-388,131,693	426,159,777,298
Beban Pemeliharaan	94,903,096,163	128,335,500	95,031,431,663
Beban Perjalanan Dinas	43,522,981,052	0	43,522,981,052
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	890,547,294	890,547,294
Beban Bunga	0	0	0
Beban Subsidi	0	0	0
Beban Hibah	0	0	0
Beban Bantuan Sosial	0	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	803,021,537,044	3,551,425,955	806,572,962,999
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	1,409,520,359	0	1,409,520,359
Beban Transfer	0	0	0
Beban Lain-Lain	0	0	0
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	1,911,668,262,146	4,800,889,053	1,916,469,151,199
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	279,183,809,519	-524,723,108,899	-245,539,299,380
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	-863,505,436	0	-863,505,436
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	863,505,436	0	863,505,436
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	2,924,427,080,945	-2,126,124,041,734	798,303,039,211
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	2,924,901,690,628	-2,126,124,041,734	798,777,648,894
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	474,609,683	0	474,609,683
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	2,923,563,575,509	-2,126,124,041,734	797,439,533,775
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	3,202,747,385,028	-2,650,847,150,633	551,900,234,395
POS LUAR BIASA	0	0	0
Beban Luar Biasa	0	0	0
POS LUAR BIASA	0	0	0
SURPLUS/DEFISIT - LO	3,202,747,385,028	-2,650,847,150,633	551,900,234,395



LAPORAN PEERUBAHAN EKUITAS (LPE)

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

Uraian	Unaudited	Koreksi BPK dan/atau Koreksi Mandiri	Audited
EKUITAS AWAL	51,082,714,832,421	0	51,082,714,832,421
SURPLUS/DEFISIT-LO	3,202,747,385,028	-2,650,847,150,633	551,900,234,395
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	0	0	0
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	-1,550,229,104,150	1,550,969,987,185	740,883,035
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	50,452,353	0	50,452,353
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	-1,554,787,957,313	2,125,791,128,362	571,003,171,049
LAIN-LAIN	4,508,400,810	-574,821,141,177	-570,312,740,367
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	145,643,504,233	0	145,643,504,233
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	1,798,161,785,111	-1,099,877,163,448	698,284,621,663
EKUITAS AKHIR	52,880,876,617,532	-1,099,877,163,448	51,780,999,454,084



Laporan Posisi BMN di Neraca 31 Desember 2023 Audited

**Laporan Barang Pengguna
Tahunan Audited Tahun 2024**

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
TAHUN ANGGARAN 2023

UAPB : 112
UAKPB : 568717

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS BATAM
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Batam

Tgl.Data : 07/05/24 6:00 AM
Tgl.Cetak : 07/05/24 8:39 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_satker

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	947,438,105
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	41,422,500
117114	Suku Cadang	656,063,000
117129	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat – Dalam	631,619,080
117131	Bahan Baku	325,389,450
117199	Persediaan Lainnya	14,933,215,074
131111	Tanah	40,164,588,595,992
132111	Peralatan dan Mesin	1,570,242,323,035
133111	Gedung dan Bangunan	3,698,968,770,818
134111	Jalan dan Jembatan	5,169,743,617,545
134112	Irigasi	3,523,968,957,735
134113	Jaringan	2,506,513,525,938
135121	Aset Tetap Lainnya	10,860,155,632
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	774,262,372,532
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(1,156,268,760,751)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(945,926,857,518)
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(3,242,347,781,903)
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(966,476,651,190)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(465,989,058,886)
137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(618,647,000)
138111	Aset Konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah	4,383,415,287,500
138121	Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra	333,099,201,771
138211	Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah	(1,913,594,087,083)
138221	Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra	(103,384,461,870)
138311	Properti Investasi	153,640,611,560
161111	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	402,192,570,867
162151	Software	49,724,838,247
162161	Lisensi	9,294,098,420
162171	Hasil Kajian/Penelitian	52,322,143,077
162311	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	2,410,236,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	183,031,311,235
166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional	352,008,100
169111	Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak ketiga	(17,759,106,153)
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(142,948,581,046)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(47,307,273,701)
169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	(6,798,526,503)
169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan	(347,508,100)
J U M L A H		53,996,398,471,509



Laporan Posisi BMN di Neraca per 31 Desember 2024

Laporan Barang Pengguna
Tahunan *Audited* Tahun 2024

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
TAHUN ANGGARAN 2024

UAPB : 112
UAKPB : 568717

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS BATAM
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Batam

Tgl.Data : 02/05/25 6:26 AM
Tgl.Cetak : 02/05/25 2:05 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_satker_poc

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	7,691,502,428
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	25,483,000
117114	Suku Cadang	452,386,634
117122	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	296,849,098
117125	Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	2,981,056,621
117129	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat – Dalam	100,638,845,528
117131	Bahan Baku	69,306,650
117199	Persediaan Lainnya	13,507,065,699
131111	Tanah	41,206,405,909,676
132111	Peralatan dan Mesin	1,704,565,966,616
133111	Gedung dan Bangunan	3,681,318,399,260
134111	Jalan dan Jembatan	5,850,308,535,953
134112	Irigasi	3,681,670,879,901
134113	Jaringan	2,693,628,756,846
135121	Aset Tetap Lainnya	10,860,155,632
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	931,479,828,189
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(1,288,646,679,010)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1,021,853,539,101)
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(3,440,983,386,026)
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(1,128,121,750,167)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(550,590,090,549)
137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(618,647,000)
138111	Aset Konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah	4,370,300,580,515
138121	Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra	338,613,637,932
138131	Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra Dalam Pengerjaan	922,670,502,369
138211	Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah	(2,025,196,740,937)
138221	Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra	(110,174,086,111)
138311	Properti Investasi	153,858,216,727
161111	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	402,192,570,867
162151	Software	50,488,651,643
162161	Lisensi	9,338,578,420
162171	Hasil Kajian/Penelitian	54,721,967,577
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	188,866,684,368
166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional	382,008,100
169111	Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak ketiga	(18,425,950,071)
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(143,584,480,606)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(48,486,311,421)
169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	(7,685,660,346)
169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan	(377,508,100)

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
TAHUN ANGGARAN 2024

UAPB : 112 BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN
UAKPB : 568717 PELABUHAN BEBAS BATAM
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Batam

Tgl.Data : 02/05/25 6:26 AM
Tgl.Cetak : 02/05/25 2:05 PM
Halaman : 2
Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_satker_poc

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
J U M L A H		56,592,589,496,804

Batam, 2 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPB
Kepala Biro Keuangan

Siswanto
197606011998111001



Neraca Laporan Keuangan

**Laporan Barang Pengguna
Tahunan Audited Tahun 2024**

NERACA - BLU
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 2024 DAN 2023
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 112

UNIT ORGANISASI : 01

null null

KODE SATKER : 568717

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS

BPKPB BATAM

null

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

Tgl Data 07/02/25 6:14 AM
Tgl. Cetak 07/02/2025 10:41 AM
lap_blu_neraca_satker_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas Lainnya dan Setara Kas	267,189,181,760	311,349,531,785	(44,160,350,025)	(14.18)
Kas pada Badan Layanan Umum	857,249,709,020	654,557,041,955	202,692,667,065	30.97
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	0	97,500,000	(97,500,000)	(100.00)
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	5,660,525,975	254,753,216,289	(249,092,690,314)	(97.78)
Piutang Bukan Pajak	1,613,847,100	1,613,847,100	0	0.00
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	1,613,847,100	1,613,847,100	0	0.00
Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum	485,998,339,551	531,837,819,441	(45,839,479,890)	(8.62)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	(170,086,752,873)	(168,856,321,245)	(1,230,431,628)	0.73
PIUTANG DARI KEGIATAN OPERASIONAL BLU (NETTO)	315,911,586,678	362,981,498,196	(47,069,911,518)	(12.97)
Persediaan	126,229,770,443	17,535,147,209	108,694,623,234	619.87
JUMLAH ASET LANCAR	1,573,854,620,976	1,602,887,782,534	(29,033,161,558)	(1.81)
ASET TETAP				
Tanah	41,195,297,421,484	40,164,588,595,992	1,030,708,825,492	2.57
Peralatan dan Mesin	1,620,179,128,886	1,570,242,323,035	49,936,805,851	3.18
Gedung dan Bangunan	3,665,400,834,829	3,698,968,770,818	(33,567,935,989)	(0.91)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	12,317,084,075,738	11,200,226,101,218	1,116,857,974,520	9.97
Aset Tetap Lainnya	10,860,155,632	10,860,155,632	0	0.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	951,951,940,312	774,262,372,532	177,689,567,780	22.95
AKUMULASI PENYUSUTAN	(7,427,712,943,005)	(6,777,627,757,248)	(650,085,185,757)	9.59
Aset Konsesi Jasa	4,703,399,782,286	4,716,514,489,271	(13,114,706,985)	(0.28)
Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa	(2,134,380,427,953)	(2,016,978,548,953)	(117,401,879,000)	5.82
JUMLAH ASET TETAP	54,902,079,968,209	53,341,056,502,297	1,561,023,465,912	2.93
Properti Investasi				
Properti Investasi	153,640,611,560	153,640,611,560	0	0.00
JUMLAH Properti Investasi	153,640,611,560	153,640,611,560	0	0.00
ASET LAINNYA				
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	402,192,570,867	402,192,570,867	0	0.00
Aset Tak Berwujud	114,156,034,303	111,341,079,744	2,814,954,559	2.53
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	0	2,410,236,000	(2,410,236,000)	(100.00)
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	30,121,811,037	0	30,121,811,037	0.00
Aset Lain-lain	207,738,856,610	201,698,528,194	6,040,328,416	2.99
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(235,531,077,237)	(231,970,172,028)	(3,560,905,209)	1.54
JUMLAH ASET LAINNYA	518,678,195,580	485,672,242,777	33,005,952,803	6.80
JUMLAH ASET	57,148,253,396,325	55,583,257,139,168	1,564,996,257,157	2.82

NERACA - BLU
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 2024 DAN 2023
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 112

UNIT ORGANISASI : 01

null null

KODE SATKER : 568717

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS

BPKPB BATAM

null

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

Tgl Data 07/02/25 6:14 AM
Tgl. Cetak 07/02/2025 10:41 AM
lap_blu_neraca_satker_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	304,015,059,805	342,196,314,810	(38,181,255,005)	(11.16)
Pendapatan Diterima Dimuka	3,629,977,340,684	3,825,246,790,166	(195,269,449,482)	(5.10)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	3,933,992,400,489	4,167,443,104,976	(233,450,704,487)	(5.60)
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
Kewajiban Konsesi Jasa	333,099,201,771	333,099,201,771	0	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	333,099,201,771	333,099,201,771	0	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN	4,267,091,602,260	4,500,542,306,747	(233,450,704,487)	(5.19)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	52,881,161,794,065	51,082,714,832,421	1,798,446,961,644	3.52
JUMLAH EKUITAS	52,881,161,794,065	51,082,714,832,421	1,798,446,961,644	3.52
JUMLAH EKUITAS	52,881,161,794,065	51,082,714,832,421	1,798,446,961,644	3.52
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	57,148,253,396,325	55,583,257,139,168	1,564,996,257,157	2.82



BP BATAM
Badan Pengusahaan Batam

Jl. Ibnu Sutowo No. 1 Batam Centre, Kepulauan Riau,

Kota Batam, Indonesia

Kotak Pos 151; Telepon 0778-462047, 462048 Fax; 0778-462240

Web: <https://www.bpbatam.go.id>